

**SKRIPSI**

**ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN  
INTERNAL KAS PADA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA) KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**RICKY ANWAR  
NIM: 172800058**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN  
INTERNAL KAS PADA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA) KABUPATEN PINRANG**



**RICKY ANWAR  
NIM: 172800058**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi  
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ricky Anwar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.058

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.961/In.398/PP.00.9/3/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ricky Anwar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.058

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.961/In.398/PP.00.9/3/2021

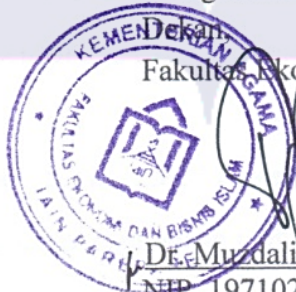
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Ketua)	(  )
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(  )
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	(  )
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Anwar Ade dan Ibunda tercinta Hartika Cedda, serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik.

4. Bapak Dr. Syahriyah Semaun., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing utama dan Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi, M.E., sebagai penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
8. Seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
9. Orang-orang terdekat yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan studi.
10. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
11. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

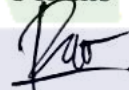
Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaapabilan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

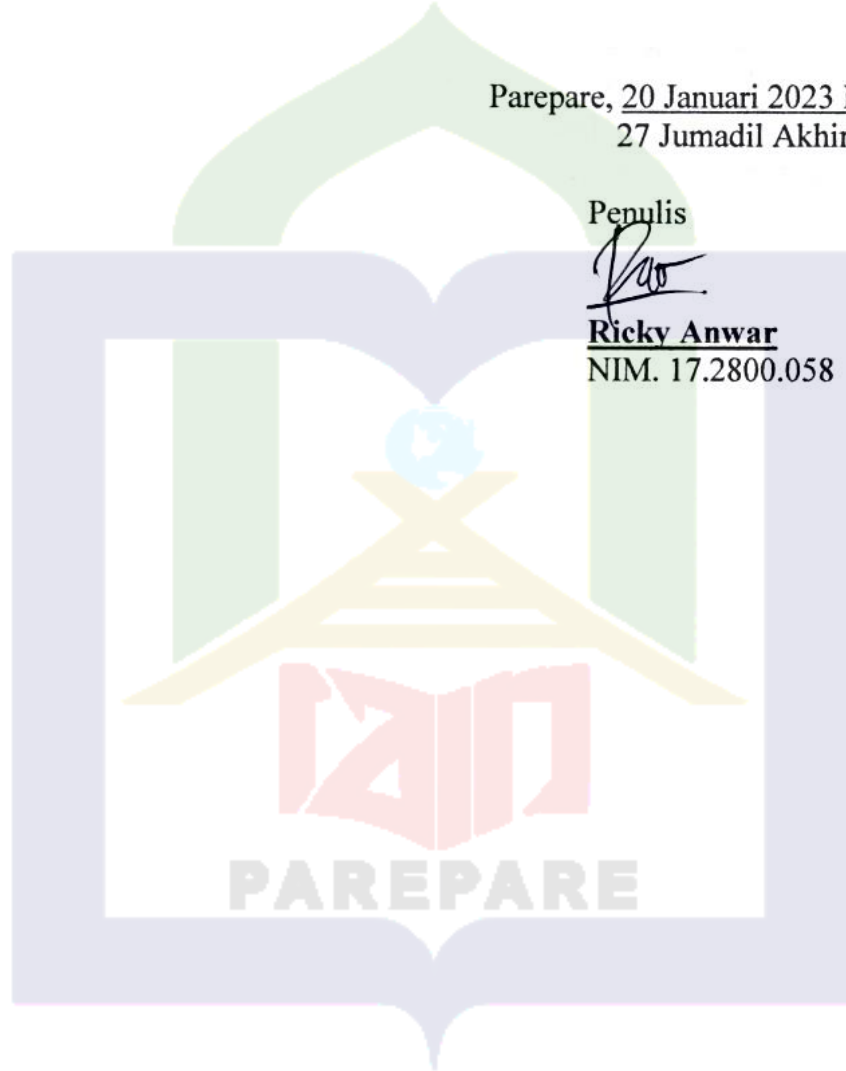
Parepare, 20 Januari 2023 M  
27 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



**Ricky Anwar**

NIM. 17.2800.058



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ricky Anwar  
NIM : 17.2800.058  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/16 Juni 1999  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2023 M  
27 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



Ricky Anwar

NIM. 17.2800.058



## ABSTRAK

Ricky Anwar. *Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Abdul Hamid)

Pengendalian internal kas merupakan tahapan dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Salah satu lembaga yang memiliki pengendalian internal kas yakni BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang. Berdasarkan hasil observasi belum diketahui pasti bagaimana fungsi penerimaan kas dan sistem akuntansi yang digunakan pada lembaga tersebut. Maka dengan hal itu, peneliti mengangkat dan membahasa bagaimana prinsip akuntansi pada lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem laporan keuangan khususnya pada kas dan adanya prinsip akuntansi syariah dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran dari hasil observasi dan wawancara langsung pada pihak yang terkait dalam lembaga yang diteliti. Penelitian ini mencakup BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang dengan lama penelitian sekitar 30 hari. Sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Yang telah selaras dengan tahapan yang diterapkan oleh PEMDA dan BPPKD Kab. Pinrang. Namun laporan arus kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang bersifat internal dan sensitif sehingga belum dipublikasikan. Pengendalian internal kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan secara baik, dimana hanya terdapat dua fungsi pengendalian yaitu fungsi pengeluaran dan fungsi akuntansi (pencatatan). Unsur pengendalian internal kas yang telah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan dengan baik, terdapat 3 prinsip yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: Pengendalian, Kas, Akuntansi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMIS PEMBIMBING .....	ii
HAIAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Pengendalian Internal.....	12
2. Sistem Pengendalian Internal.....	18
3. Sistem Pengendalian Internal Kas.....	19

4. Kas dan Lapora Arus Kas.....	21
5. Laporan Keuangan .....	28
6. Perspektif Islam.....	34
C. Tinjauan Konseptual .....	39
D. Kerangka Pikir .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Hasil Penelitian .....	49
B. Pembahasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP .....	74
A. Simpulan .....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	79
BIODATA PENULIS .....	102

**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2020	50
4.2	Persediaan	64
4.3	Peralatan dan mesin	65
4.4	Gedung dan bangunan	65
4.5	Aset Tak Berwujud	66



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
01	Instrumen Penelitian	80
02	SK Pembimbing	82
03	Izin Meneliti Kampus	83
04	Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal	84
05	Surat Selesai Penelitian	85
06	Dokumentasi	100



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we



هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Apabila terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
 نَعْمٌ : *nu‘ima*  
 عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Apabila huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)  
 عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Apabila terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dewasa ini berkembang sangat pesat. Kehadiran akuntansi memiliki peran yang sangat penting. Akuntansi membantu mendapatkan informasi tentang transaksi keuangan. Akuntansi adalah tahap mengumpulkan, mengidentifikasi dan mencatat serta meringkas data keuangan dan pelaporannya kepada pihak yang mempergunakan, kemudian menafsirkannya untuk membuat keputusan ekonomi. Menurut Charles T Hongren, Walter T Harrison Jr. dan Linda Smith Bamber menjelaskan bahwa “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memtahap informasi tersebut menjadi laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para penentu keputusan”<sup>1</sup> Menurut Sumarni dan Suprihanto, “Akuntansi adalah suatu tahapan dalam pencatatan, mengelompokkan, melakukan ringkasan, membuat laporan dan adanya analisis data keuangan dari suatu entitas/perusahaan.”<sup>2</sup>

Akuntansi tidak hanya dipergunakan oleh entitas/perusahaan saja, akan tetapi dalam instansi pemerintah akuntansi juga dipergunakan Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, akuntansi adalah tahap pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan Dari pengertian di atas terkandung tujuan utama akuntansi menghasilkan atau menyaapabilan informasi ekonomi (*economic information*) kepada pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup>Walter T Harrison Jr, Linda Smith Bamber, *Accounting, fifth edition, Prentice Hall, Inc,* (New Jersey: Indeks, 2006), h.6.

<sup>2</sup> Sumarni Murti dan Jhon Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Entitas/perusahaan) Edisi Kelima* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005), h. 395.

berkepentingan. Informasi akuntansi itu pada dasarnya menyaapabilan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan sehingga akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Akuntansi Syariah ah ialah akuntansi yang memiliki basis islam atua lebih akrab di kenal dengan istilah akuntansi Islam. Akunstasi Islam adalah akuntansi yang memiliki basis berlandaskan Al-qur'an dan Hadits serta kesepakatan ulama. Adapun akuntansi ini memiliki pembeda dengan akuntanasi konvesional. Hal yang mendasarinya ialah penggunaan prinsip *cash basic* sedangkan yang digunakan oleh akuntansi konvesional ialah *actual basic*. Akuntansi Islam secara struktural memiliki aktiva yang beda dengan akuntansi konvensional.<sup>3</sup> Dalam Prinsip Akuntansi Syariah terdapat dalam Surat Al-Baqarah, ayat 282 yang di uraikan tiga prinsip yakni, pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) tentunya akan mengarah pada internal lembaga tersebut Maka dengan hal itu, perlu adanya Prinsip-prinsip pengendalian internal kas yang dilihat dari sudut pandang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Tujuan dengan adanya pengendalian internal ini untuk membantu manajemen dan mengatur lembaga/entitas/perusahaan yang dimana salah satunya adalah tata cara pengelolaan kas Alasan lainnya adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan, penipuan, penggelapan, pemborosan terhadap entitas/perusahaan, apalagi lembaga BAPPELITBANGDA adalah lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan memerlukan manajemen yang baik,

---

<sup>3</sup> Ali Mauludi AC, *Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis, Aplikatif*, (Akuntansi Syariah Vol.1No. 1, 2014), h.59.



memerlukan adanya transparansi dari transaksi keuangan dalam penerimaan dan pengeluaran kas untuk melindungi keuangan maka perlu penerapan dalam pengendalian internal kas kepada lembaga BAPPELITBANGDA.

Permasalahan yang sering dihadapi atasan dalam menggerakkan suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah, semakin kompleks dan semakin sulit untuk dilakukan sendiri. Salah satu contoh permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap instansi pemerintah adalah cara pengelolaan kas yang aman. Sehingga peran akuntansi sangat diperlukan untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Akuntansi diartikan sebagai seni pengumpulan, pengelompokan, pencatatan dan pembuatan laporan untuk menghasilkan laporan diperlukan, pengendalian dan pengawasan agar laporan tersebut akurat.<sup>4</sup>

Kas adalah bentuk aset yang paling likuid, yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial entitas/perusahaan.<sup>5</sup> Setiap penerimaan kas dan tahap administrasi harus dilakukan dengan benar. Ini berarti bahwa agensi dan organisasi tidak boleh kehabisan uang untuk menutupi berbagai pengeluaran bisnis mereka. Kelola uang tunai Anda seefisien mungkin untuk menghindari pemborosan. Dalam tahap pengumpulan dan pengeluaran uang tunai dilakukan selaras dengan protokol yang ditentukan.<sup>6</sup>

Mengingat komponen dan kecenderungannya, uang tunai selalu digunakan sebagai objek utama yang disalahgunakan sehingga mungkin manajemen dalam

---

<sup>4</sup> Chelsi Nizara O.K, *Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDALitbang) Provinsi Riau* (Skripsi Sarjana; Akuntansi: UIN SUSKA RIAU, 2012), h.1.

<sup>5</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 107.

<sup>6</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 188.

organisasi pemerintah sangat rumit dan bahkan tidak fenomenal untuk *misrepresentasi* atau pengendalian internal sepenuhnya diperlukan sejalan dalam pengembangan dan kemajuan pertukaran di dalam suatu organisasi..<sup>7</sup>

Pengendalian dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengkoordinasikan tindakan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa mereka mengikuti rencana yang telah ditentukan. Selain itu, pemantauan adalah tugas manajerial yang sangat penting untuk melakukan penyusunan pengendalian internal yang lebih baik. Suatu instansi pemerintah biasanya memiliki 3 (tiga) elemen yaitu berupa partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas Untuk mewujudkan ketiga elemen maka diperlukan kerjasama dalam hal manajemen dan pengendalain sehingga dapat menciptakan kesadaran dan perilaku yang positif dalam pentingnya menegakkan pengendalian internal Untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing instansi, dari segi pengelolaan kas maka diperlukan suatu sistem yang nantinya akan membantu mengendalikan serta mengawasi setiap kegiatan operasional Sistem yang dimaksud ialah sistem pengendalian internal kas Pengendalian intelnal kas dimaksudkan agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan dari pihak pegawai dalam instansi itu sendiri atau dalam artian lain untuk mengamankan dan melindungi aset negara

Salah satu instansi pemerintah adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang yang memiliki tugas untuk mengkoordinir pembangunan di daerah Pinrang. Maka, hal tersebut memerlukan suatu perencanaan kas yang efektif dan efisien. Adanya peranan kas dalam kegiatan entitas/perusahaan, maka entitas/perusahaan harus

---

<sup>7</sup> Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.11.

meriksa bahwa apakah penerimaan kas telah berjalan dengan baik untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kas pada manajemen, memberika cerminan transparansi dari transaksi keuangan, menjaga kekayaan/harta entitas/perusahaan dan untuk mendukung produktivitas entitas/perusahaan agar mengetahui seberapa besar penerapan pengendalian internal entitas/perusahaan sejak dari penerimaan sampai pengeluaran kas untuk menghindari munculnya penyalahgunaan, penipuan, penggelapan, pemborosan terhadap aset/ entitas/perusahaan atau tindakan lain yang membuat entitas/perusahaan mengalami kerugian.

Namun, dari hasil observasi yang dilakukan penulis atau pengamatan data awal di BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang terdapat pengendalian internal kas yang belum penulis ketahui fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kasnya, dan dari analisa penulis melihat informasi yang di berikan begitu kurang memahami letak fungsi tanggungjawab pegawai bagian keuangan. Penjelasan tersebut bertolak belakang dengan apa yang seharusnya ada pada pengendalian internal kas. Dimana terpisahnya fungsi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam observasi juga mengetahui bahwa laporan penerimaan kas yang ada bersifat sensitif sehingga tidak dapat dipublikasikan.

Melalui Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 yang mengatur sistem pengendalian internal pemerintah dimana pada pasal 47 untuk memperkuat dan mengendalikan dan menunjang efektivitas pengendalian maka diperlukan pengawasan atas penyelenggaraan fungsi dan tugas instansi pemerintah termasuk dalam akuntabilitas keuangan negara dalam menerapkan sistem pengendalian internal kas maka perlu diperhatikan oleh setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan laporan keuangan yang akurat serta handal dalam mewujudkan laporan

keuangan yang handal dan akurat maka dalam pengawasan atas penyelenggaraan yang termasuk dalam akuntabilitas negara haruslah selaras dengan aturan dan ketentuan hukum yang telah diatur Sebagaimana diatur dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang mengatur tentang penerapan dalam menyusun laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah N0.71 Tahun 2010.

Harapan penulis pegawai instansi dapat menerapkan sistem pengendalian internal kas yang selaras letak dan fungsinya serta menggunakan prinsip akuntansi syariah sehingga manajemen kerja berjalan dengan baik agar kas yang digunakan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Analisis Prinsip Akuntansi Syariah Terhadap Pengendalian Internal Kas Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengendalian internal pengeluaran kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang?
2. Bagaimana Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang dalam analisis prinsip Akuntansi Syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal pengeluaran kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang
2. Untuk mengetahui Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang dalam analisis prinsip Akuntansi Syariah

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperluas ilmu para pembacanya serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian selantunya.
2. Secara praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian yakni :
  - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberi tambahan dan memperluas pengetahuan serta pengalaman untuk mengaktualisasikan teori yang telah didapka.
  - b. Bagi entitas/perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan masukan bagi entitas/perusahaan dalam menjalankan tindakan-tindakan dimasa yang depan.
  - c. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan koleksi bacaan dan dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian berikutnya.

## BAB II TINJAUAN TEORI

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun dalam melakukan penelitian ini terdapat penelitian relevan yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan oleh peneliti. Berikut penelitian yang diangkat tersebut:

1. Nurul Mutmainnah dalam penelitiannya pada tahun 2016 dengan Judul Skripsi “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas Pada PT Pos Indonesia (persero) cabang Sinjai”.

Kemiripan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Kas dan teknis analisis data kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada hasil penelitiannya. Hasil penelitian yang dilakukan Nurul Mutmainnah menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian terhadap efektifitas pengelolaan kas dilingkup PT.POS indonesia (Persero) Cabang Sinjai begitu rendah atau tidak memiliki efek. Ini ditunjukkan dengan respon dari responden dan ditunjukkan oleh hasil perhitungan manual yang peneliti lakukan. Hasil koefisien determinasinya, yaitu  $(R^2) = 1,20\%$ , artinya memiliki pengaruh yang begitu rendah sehingga 98,74 % di pengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti di dalam skripsi ini.<sup>8</sup>

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yang menjelaskan bahwa Pengendalian internal kas pada BAPPELITBANGDA

---

<sup>8</sup> Nurul Mutmainnah, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (persero) cabang Sinjai* (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 64.

Kab. Pinrang telah diterapkan secara baik, dimana hanya terdapat dua fungsi pengendalian yaitu fungsi pengeluaran dan fungsi akuntansi (pencatatan). Unsur pengendalian internal kas yang telah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan dengan baik, terdapat 3 prinsip yaitu, pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

2. Agus Utomo dalam penelitiannya pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PDAM Tirta Jeneberang Gowa”

Kemiripan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti saat ini yaitu ingin mengetahui sistem pengendalian intern atas penerimaan kas Sedangkan, perbedaannya terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Utomo di PDAM Tirta Jeneberang Gowa menjelaskan bahwa tahap pengendalian dan pengawasan terhadap penerimaan kas yang berjalan di PDAM Tirta Jeneberang Gowa telah berjalan dengan cukup baik serta telah memenuhi standar Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang berlaku umum.<sup>9</sup>

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan saat ini menjelaskan bahwa Pengendalian internal kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan secara baik, dimana hanya terdapat dua fungsi pengendalian yaitu fungsi pengeluaran dan fungsi akuntansi (pencatatan). Unsur pengendalian

---

<sup>9</sup> Agus Utomo, Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PDAM Tirta Jeneberang Gowa, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 40

internal kas yang telah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan dengan baik, terdapat 3 prinsip yaitu: pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran

Hasil penelitian yang dilakukan Agus Utomo mengarah pada penerimaan kas dan prinsip Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan peneliti lebih kearah pengeluaran kas dan Prinsip Akuntansi Syariah.

3. Maria Anastasia dalam penelitiannya pada tahun 2013 dengan Jurnal Penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem dan Tahapan Pengendalian Interen Penerimaan Kas Pada UD Kanca Karya Banjarbaru”

Kemiripan dalam penelitian ini terletak pada tujuannya yang sama yaitu untuk menganalisis sistem pengendalian internal kas dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada hasil penelitian. Pada penelitian terfokus pada pengeluaran kas yang selaras dengan akuntanilitas dan prinsip syariah. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti, terletak pada hasil penelitiannya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Anastasia adalah selama UD Kanca Karya Banjarbaru masih belum dilakukan secara rutin pemeriksaan pada pengelolaan penerimaan kas dalam pengujian ketepatan dan kecermatan saldo fisik dan catatan kas. Ini mengakibatkan lemahnya sistem pengendalian internal pada usaha ini. Adanya fungsi yang merangkap dalam menjalankan



tugas terhusus pada aspek administrasi yakni merangkapnya fungsi bagian pembukuan sekaligus kasir. Tentu ini memberikan implikasi bertumbuhnya kerjaan dan pembukuan serta informasi laporan keuangan menjadi terlambat dari jadwal yang ditetapkan/akhir periode .<sup>10</sup>

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa Pengendalian internal kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan secara baik, dimana hanya terdapat dua fungsi pengendalian yaitu fungsi pengeluaran dan fungsi akuntansi (pencatatan). Unsur pengendalian internal kas yang telah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan dengan baik, terdapat 3 prinsip yaitu: pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran

4. Desi Pakadang dalam penelitiannya pada tahun 2013 dengan Jurnal Penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria di Tomohon”

Kemiripan dalam penelitian ini terletak pada tujuannya yaitu sama-sama menganalisis tentang sistem pengendalian intern kas dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun yang menjadi pembeda anatar penelitiain ini dengan yang dilakukaukan peneliti yakni pada fokus penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Desi Pakadang menjelaskan pada hasil penelitiannya bahwa

---

<sup>10</sup> Maria Anastasia, *Analisis Sistem dan Tahapan Pengendalian Interen Penerimaan Kas Pada UD. Kanca Karya Banjarbaru*,(Jurnal KINDAI Vol.9 No.2, 2013), h. 157.

penerapan sistim pengendalian intern penerimaan kas pada Rumah Sakit Gunung Maria baik. aka tetapi, ada beberapa bagian yang mash harus diperbaiki.<sup>11</sup> Sedangkan, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pengeluaran arus kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang.

Hal ini dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa Pengendalian internal kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan secara baik, dimana hanya terdapat dua fungsi pengendalian yaitu fungsi pengeluaran dan fungsi akuntansi (pencatatan). Unsur pengendalian internal kas yang telah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan dengan baik, terdapat 3 prinsip yaitu: pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Pengendalian Internal**

#### **a. Pengertian Pengendalian Inernal**

COSO mendefenisikan Pengendalian internal adalah tahapan yang digunakan oleh dewan direksi, manajemen, dan semua personel yang bekerja di bawah pengawasan mereka dengan tujuan untuk memastikan tujuan pengendalian terpenuhi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Desi Pakadang, Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon, (Jurnal EMBA Vol.1 No.4, 2013)

<sup>12</sup> Seprida Hanum, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h.91.

Pengendalian yang dipandang oleh Hery merupakan kumpulan kebijakan dan sistem untuk melindungi *asset*/kekayaan atau sumber daya organisasi dari segala macam penyalahgunaan, memastikan aksesibilitas data pembukuan organisasi yang akurat dan memastikan bahwa semua pedoman hukum/hukum dan kebijakana manajemen telah diikuti atau dijalankan oleh semua karyawan organisasi. Pedoman atau ketentuan yan dimaksudkan meliputi di bidang pajak, bidang usaha permodalan, peraturan usaha, undang-undang anti korupsi dan hal lainnya. Pengendalian internal juga melakulan pemantauan apakah setiap komponen dalam kegiatan usaha/operasional dijalanka selaras dengan langakah dan pedoman/kebijakan yang di tetapkan manajemen.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Pengendalian internal ialah menggunakan sumber dayar/kekayaan suatu entitas/perusahaan agar mengalami peningkatan dan menggiring kegiatan yang bertujuan pasti tercapainya tujuan yang diharapkan olhe entitas/perusahaan.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup tahap yang diterapkan dewan direksi, manajemen, serta bawahannya, guna membagikan jaminan yang memadai mengenai tercapainya tujuan- tujuan pengendalian dibawah ini:

- 1) Adanya pengamanan *asset*/kekayaan dan data instantsi/entitas/perusahaan baik itu keamanan fisik dan data yang digunakan tidak merugikan entitas/perusahaan.

---

<sup>13</sup> Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.11.

- 2) Melihat catatan dengan begitu mendalam/detail dan gambarkan sumber daya organisasi secara tepat dan wajar
- 3) Penyediaan data/informasi yang tepat dan dapat dipercaya, yang dimaksudkan disini informasi yang tidak asal-asalan
- 4) Adanya jaminan yang mencakup keselarasan antara laporan keuangan dan prinsip akuntansi yang umum berlaku sehingga memberikan kepatuhan standar pelaporan bagi pihak diluar manajemen.
- 5) Efisiensi Operasi meningkat. Peningkatan efisiensi yang dapat ditempuh dengan cara menciptakan kebijakan operasi selaras dengan apa yang direncanakan, adanya upaya melakukan kegiatan secara berkesinambungan dan objektif dalam praktik mengendalikan.
- 6) Memberi dorongan agar dapat patuh pada kebijakan manajemen. Hal ini mencakup patuh terhadap tahapan dan administrasi kegiatan kebijakan manajemen, termasuk sistem otorisasi untuk transaksi, mencatat transaksi dengan akurat dan mengamankan aktiva.
- 7) Patuhnya organisasi pada produk hukum yang berlaku. Dikarenakan efek dari melanggar hukum dapat memberikan kerugian. Minimal memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikannya sehingga menarik perhatian dan tidak produktifnya sumber daya yang dimiliki entitas/perusahaan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> L.M. Samryn, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.259.

c. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Unsur/komponen pokok sistem pengendalian internal menurut Mulyadi, adalah:

- 1) Struktur Organisasi yang terpisah dalam hal tanggungjawab fungsional secara tegas. Tanggungjawab fungsional pada organisasi dibagi sesuai pada prinsip, sebagai berikut:
  - a) Dipisahkannya fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
  - b) Suatu fungsi tidak seharusnya diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan keseluruhan tahap transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan tahapan pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya
- 3) Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi tiap unit organisasi.

d. Komponen-komponen Pengendalian Internal

Terdapat 5 komponen yang berkaitan didalam suatu pengendalian internal. Berikut unsur/komponennya:

- 1) Lingkungan/area pengendalian menentukan corak dalam organisasi, memberikan pengaruh kesadaran pengendalian orang-orangnya. Area/lingkungan pengendalian menjadi dasar dari keseluruhan komponen pengendalian.
- 2) Penaksiran resiko adalah mengidentifikasi perusahaan/entitas dan menganalisis resiko yang sesuai dalam pencapaian tujuan, membuat

suatu dasar agar resiko yang mesti dikelola dapat ditentukan bagaimana penyelesaiannya.

- 3) Aktivitas/kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan langkah dalam membantu terberinya jaminan agar arahan dari manajemen dilaksanakan.
  - 4) Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan serta pertukaran informasi/data dalam suatu pola/bentuk dan waktu yang memungkinkan orang dalam menjalankan tugas mereka.
  - 5) Pemantauan/Pengawasan adalah tahap/tahap nng menjadi penentu mutu/kualitas kinerja pengendalian intern dari waktu ke waktu.<sup>15</sup>
- e. Prinsip-prinsip pengendalian internal

Tujuan pengendalian internal berdasarkan sudut pandang Sistem Informasi Akuntansi, lebih diarahkan dapat memberikan bantuan pada manajemen dalam memberikan keamanan pada aset entitas/perusahaan dan memberikan pembinaan Sistem Informasi Akuntansi yang dapat dipercaya dan handal.

Weygrant, Kieso, Kimmel mengemukakan bahwa kedua tujuan ini dapat dicapai ada beberapa prinsip pengendalian internal yakni sebagai berikut:

- 1) Penetapan tanggungjawab,
- 2) Pemisahan tugas,
- 3) Tahapan dokumentasi,
- 4) Kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik,

---

<sup>15</sup> Sukrisno Agoes, Auditing, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.100.

- 5) Verifikasi internal yang bersifat independen,
  - 6) Alat pengendalian lainnya<sup>16</sup>
- f. Hukum Pengendalian internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi/lembaga Pemerintah terhadap Pengendalian Internal agar meningkatkan keandalan Laporan keuangan dan kinerja seperti yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintahan ini, setiap entitas pelapor dan akuntansi wajib menerapkan sistem pengendalian internal selaras dengan ketentuan produk hukum yang relevan oleh bendahara umum negara/daerah.

Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian negara/lembaga/pemda melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan kinerja agar keandalan informasi yang disampaikan telah pasti sebelum disampaikan oleh Menteri/gubernur/bupati/walikota kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang mengangkat pejabat pengawasan intern pemerintah untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan perhitungan anggaran serta dana dekonsentrasi/tugas pembantu pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Cenik Ardana dkk, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h.80.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.

## 2. Sistem Pengendalian Internal

### a. Defenisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern menurut Bambang dapat memiliki beberapa defenisi yaitu dalam arti sempit Sistem Pengendalian Intern dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan mekanis guna melakukan pemeriksaan data-data administrasi dengan teliti seperti melakukan penyesuaian perhitungan mendatar dan vertikal. Sedangkan dalam arti luasnya, dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki ilmu tertentu yang ada pada sebuah entitas/perusahaan. Sistem tersebut mencakup kebijakan, metode, tahapan, alat peraga, dokumentasi sekumpulan orang yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya agar memberikan hal berikut :

- 1) Menjaga kekayaan/harta,
- 2) Memberi jamminan terhadap “terjadinya utang yang tidak layak”,
- 3) Memberi jaminan kecermatan dan dapat dipercayainnya data akuntansi,
- 4) Memperoleh operasi secara efisien,
- 5) Memberikan jaminan kebijakan entitas/perusahaan dapat ditaati.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) Sistem Pengendalian Intern mencakup struktur organisasi, semua cara dan ketetapan yang terkoordinasi dimana diterapkan dalam entitas/perusahaan agar melindungi aset, diperiksa secara akurat dan sejauh mana data akuntansi mampu dipercaya memberi peningkatan efisiensi bisnis dan memberi dorongan kepatuhan terhadap kebijakan entitas/perusahaan yang telah ditentukan. Untuk mendukung manajemen pengendalian sistem, pengendalian sistem harus mencakup kebijakan dan tahapan untuk



menyelesaikan fungsi pencatatan, pengendalian fisik dan menjalankan aktivitas operasional dari fenomena ekonomi dalam entitas/perusahaan.<sup>18</sup>

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal (*internal control system*) dibentuk dalam beberapa aspek yakni kebijakan, praktik dan tahapan yang dijalankan oleh entitas/perusahaan dalam pencapaian keempat tujuan umumnya:

- 1) Melindungi/terjaganya aktiva entitas/perusahaan;
- 2) Dipastikan akuntansi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi
- 3) Memberi dorongan agar terciptanya efisiensi dalam operasi entitas/perusahaan
- 4) Mengukur dengan kebijakan serta tahapan yang ditentukan oleh pihak manajemen.<sup>19</sup>

**3. Sistem Pengendalian Internal Kas**

Sistem pengendalian kas internal ialah sarana, alat dan mekanisme yang digunakan agar memberikan keamanan, mencegah pemborosan, menjaga keakuratan, dan mendorong efisiensi dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kas dari terjadinya kas dicuri, terjadinya penggelapan dan aksi penipuan yang dilakukan oleh karyawan atau orang yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian kas internal mencakup 3 hal, yakni :

a. Pengendalian akuntansi.

Pengendalian akuntansi terdiri dari rencana organisasi dan tahapan serta sekumpulan catatan terkait dengan keamanan aset/kekayaan entitas/perusahaan dari sekumpulan catatan keuangan yang dipercaya,

<sup>18</sup> Bambang Kekayaan/hartadi, Sistem Pengendalian Intern, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.3.

<sup>19</sup> James A. Hall, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.181.

oleh karena itu penyusunan dilakukan dengan seksama untuk memberikan keyakinan bahwa :

- 1) Tiap transaksi dilakukan selaras dengan kesepakatan atau wewenang atasan baik yang memiliki sifat umum maupun khusus.
  - 2) Dicatatnya tiap transaksi secermat mungkin sehingga rangkuman keuangan sekiranya selaras dengan prinsip akuntansi atau ciri lain selaras dengan tujuan rangkuman tersebut dan memberikan penekanan atas tanggungjawabnya terkait kas/aktiva perusahaan/instansi.
  - 3) Kekuasaan terhadap kekayaan entitas/perusahaan diserahkan apabila dengan kesepakatan atau wewenang atasan
  - 4) Jumlah aktiva/kekayaan/harta kekayaan entitas/perusahaan seperti yang tertera dalam catatan entitas/perusahaan diselaraskan dengan aktiva/kas yang ada pada waktu yang pas/sesuai dengan tindakan yang sewajarnya diambil apabila terjadi ketidaksaamaan.
- b. Pengendalian administrative.

Pengendalian *administrative*/administratif mencakup (tetapi tidak sebatas) rancangan dan tahapan serta pencatatan terkait dengan tahap pembuatan keputusan yang mengarahkan atasan entitas/perusahaan menyepakati atau memberikan wewenang ketika terjadinya berbagai transaksi. Diberinya wewenang tersebut merupakan fungsi atasan entitas/perusahaan terkait secara langsung dengan tanggungjawab dalam pencapaian titik tolak serta mewujudkan pengendalian akuntansi atau transaksi

c. Pengendalian operasi.

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan apakah penggunaan barang/inventaris dengan fungsinya selaras. Penggunaan ini karena ini dapat menentukan nilai ekonomis aktiva agar tetap aman atau utuh, tahan dan mempergunakan barang/inventaris yang ada. Dari segi operasi dan administratif, pimpinan entitas/perusahaan tidak dapat memantau dan melakukan pengendalian langsung. Hal ini juga berlaku pada segi akuntansi, atasa atau pimpinan perusahaan tidak selamanya bisa melakukan pemeriksaa, pemantauan dan meneliti keseluruhan tahapan mulai dari dibuatnya bukti transaksi hingga diolahnya data menjadi laporan keuangan. Konidisi inilah yang menjadikan sistem menggantikan peran dari atasan atau pimpinan dari suatu entitas/perusahaan.<sup>20</sup>

#### 4. Kas dan Laporan Arus Kas

a. Pengertian Kas

Kas menurut Martani, merupakan aset keuangan yang pergunakan dalam pelaksanaan operasional entitas/perusahaan. Kas ialah aset yang paling likuid dikarenakan dapat dipergunakan membayar kewajiban entitas/perusahaan. Tidak ada standar akuntansi khusus terkait kas. Tetapi, secara umum dibahas dalam standar mengenai instrumen keuangan.<sup>21</sup>

Kas dalam entitas/perusahaan begitu penting karena tanpa kas, kegiatan operasi entitas/perusahaan tidak dapat dijalankan. Entitas tidak mampu membayar gaji, memenuhi hutang yang terlambat bayar dan kewajiban

---

<sup>20</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-internal/>, (diakses pada minggu, 07 Agustus 2022)

<sup>21</sup> Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.180.

lainnya. Entitas/perusahaan harus menjaga jumlah kas agar selaras dengan pemenuhan kebutuhannya. Apabila jumlah kas kurang, maka akan terganggunya kegiatan operasional dalam suatu entitas. Kelebihan kas dapat berakibat entitas tidak dapat menggunakan kas tersebut untuk meraih pengembalian yang tinggi. Kas pada umumnya dipergunakan sebagai alat untuk membayar aktivitas operasi entitas/perusahaan agar tidak ada kesulitan.

Kas yang dikemukakan menurut Agus adalah semua uang tunai yang dipegang (*cash on hand*) dan dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk yang berbeda seperti halnya deposito, rekening koran. Kas menjadi alat tukar yang sebisa mungkin manajemen mengoperasikannya dalam seluruh aktivitas usahanya.<sup>22</sup>

Uang kas secara khusus dapat dipahami sebagai uang tunai yang ada pada suatu entitas/perusahaan dan memiliki catatan dalam neraca pada posisi aktiva lancar. Kas juga diartikan secara umum ialah uang yang diletakkan di bank, yang dapat dicairkan/ditarik kapan pun. Di dalam neraca kas yang diletakkan di bank, yang dapat diambil setiap saat.

b. Tahapan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

1) Penerimaan Kas

Kas pemerintah daerah meliputi kas yang dikuasai, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan yang tidak dikuasai Bendahara Umum Daerah Kas Pemda yang dikuasai oleh BUD adalah:

---

<sup>22</sup> R. Agus Sartono, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: BPFE, 1996), h.519.

- a) Saldo Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang Kepala Daerah telah tetapkan.
- b) Setara kas, seperti halnya Surat Utang Negara (SUN)
- c) Uang tunai di Bendahara Umum Daerah

Kas Pemda yang dikuasai oleh selain BUD adalah:

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD
- b) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan sistem penerimaan kas daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Surat Setoran Retribusi Daerah

Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah catatan pembayaran atau penerimaan Retribusi yang sah dilaksanakan dengan melakukan pengisi pada formulir atau penggunaan formulir atau yang dilakukan dengan cara berbeda seperti ke Rekening Kas Daerah melalui lokasi pembayaran yang diarahkan oleh Gubernur

- b) Surat Tanda Setoran (STS)

Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang dipergunakan dalam melakukan penyetoran pada penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD

- c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang dipergunakan untuk penetapan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pemakaian anggaran.

d) Surat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

Surat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) adalah surat yang akan diterima oleh wajib retribusi setelah melakukan pembayaran atas penggunaan sarana/prasana kekayaan daerah

e) SPJ Penerimaan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan SKPD

f) Penggabungan Penerimaan Harian<sup>23</sup>

Menurut Halim (2007) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah bahwa Uraian tahapan penerimaan kas daerah yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD dan SKPKD, adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dijalankan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD
- b) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD sesuai dengan bukti transaksi penerimaan kas dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas, ditulis dengan rekening lawan sumber penerimaan kas tersebut
- c) Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
  - d) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
    - i. Surat Tanda Setoran (STS)
    - ii. Bukti Transfer
    - iii. Nota Kredit
    - iv. Bukti Penerimaan lainnya

---

<sup>23</sup> Ratmono, Dwi & Sholihin, Mahfud, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UPPS STIM YKPN, 2015), h.154

- e) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau bertahap dilakukan pembaruan ke buku besar
- f) Apabila dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat dibuatkan buku besar dengan maksud membantu rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol
- g) Pencatatan kedalam jurnal penerimaan kas, buku besar dan buku besar pembantu dilakukan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku
- h) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.<sup>24</sup>

## 2) Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah adanya transaksi yang memicu saldo kas dan bank milik entitas/perusahaan berkurang dikarenakan adanya pembelian tunai, pelunasan utang ataupun hasil transaksi yang mengakibatkan kas berkurang. Pengeluaran kas dengan cek dapat dipergunakan. Pengeluaran kas yang tidak dapat dicairkan dengan cek biasanya yang jumlahnya terbilang kecil.<sup>25</sup>

Pengendalian intern yang baik mewajibkan semua pengeluaran kas yang besar dikeluarkan dengan cek. Sedangkan, pengeluaran dengan jumlah yang kecil dikeluarkan melalui dana kas kecil yang

---

<sup>24</sup> Halim, Abdul dan Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.76

<sup>25</sup> Soemarso S. R., *Akuntansi Suatu Pengantar*( Jakarta :Salemba Empat,2015), h.297

diselenggarakan dengan sistem impres. Pengeluaran kas dengan cek dapat memberi jaminan diterimanya pembayaran tersebut oleh entitas/perusahaan yang berhak menerimanya dan sekiranya melibatkan bank sebagai pihak ketiga dalam hal ini, agar dapat ikut memantau pengeluaran kas. Ini bertujuan agar sistem pengeluaran kas ini hanya akan melakukan pengeluaran kas dengan cek saja, sedangkan kas yang tidak dapat dikeluarkan dengan cek diatur dalam sistem kas kecil.<sup>26</sup>

Tahapan akuntansi dalam pengeluaran kas mencakup serangkaian tahapan, baik manual maupun digital berawal dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dasar atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD<sup>27</sup>

Penjelasan dari beberapa defenisi di atas bahwa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab atas terlaksananya tugas pemerintahan di bidang tertentu sekaligus pengguna barang di daerah provinsi, kabupaten atau kota. Tahapan pengelolaan kas ada dasarnya memiliki tujuan yakni:

- a) Memberi tahapan yang baku atas aktivitas terkait dengan adanya informasi yang diperoleh terkait kas dari pengakuan sampai tahap penerimaan.
- b) Mendapat data atau catatan yang detail tentang kas yang selaras dengan *input* dari masing-masing dinas/unit kerja

---

<sup>26</sup> Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, h. 515.

<sup>27</sup> Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2018), h.48



- c) Mendukung pembuatan keputusan unit yang mengendalikan fungsi kas.

Hal demikian dapat disimpulkan bahwa sistem dan tahapan akuntansi pengeluaran kas pada SKPD adalah serangkaian tahapan baik manual maupun digital dalam pengerjaannya dimulai dari pencatatan, penggolongan sampai mendapatkan data yang akurat tentang tahapan sub sistem Akuntansi pengeluaran kas terdiri atas :

- a) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
  - b) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - c) Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
  - d) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - e) Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
  - f) Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)
- 3) Laporan Arus kas

Laporan Arus kas begitu berperan bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dalam menilai dan memperoleh ilustrasi tentang mutasi kas dari saldo awal ke saldo akhir dalam periode laporan

Laporan arus kas dibagi menjadi aktivitas utama yaitu, Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan dan arus kas dari aktivitas nonanggaran Dimana masing-masing dari aktivitas dilaporkan dalam laporan arus masuk dan arus keluar sehingga memperoleh informasi tentang arus kas bersih dari tiap aktivitas Arus kas bersih dari keempat aktivitas kemudian ditambahkan agar diketahui kenaikan atau penurunan kas bersih selama

satu periode akuntansi. Saldo kas akhir diperoleh dari perhitungan saldo kas awal yang diperoleh dari data neraca pada awal periode ditambah dengan kenaikan atau penurunan kas selama suatu periode. Saldo pada akhir laporan arus kas akan selaras dengan yang dilaporkan dalam neraca pada akhir periode.

## 5. Laporan Keuangan

### a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi terkait posisi dan kinerja keuangan dari sebuah entitas/perusahaan/entitas yang disiapabilan dengan terstruktur. Catatan informasi yang disiapabilan tersebut dapat digunakan oleh entitas/perusahaan untuk mengilustrasikan kinerja perusahaannya. Begitu pula yang terjadi dalam keuangan pemerintah yang memiliki kewajiban memberikan penyajian laporan keuangan dari dan yang diperolehnya. Laporan keuangan dalam rana pemerintahan dan entitas/perusahaan/entitas memiliki kesamaan dalam penyajian laporan keuangan dan telah diatur jelas berdasarkan aturan/ketetapan hukum dalam prinsip dan pelaporan keuangan akuntansi. Hal yang kemudian menjadi pembeda adalah konponen dan sturktural dari laporan keuangannya.

### b. Entitas Laporan Keuangan Pemerintah

Entitas pelaporan merupakan bagian dari pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih dengan ketetuannya menurut hukum perundang-undangan memiliki kewajiban melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang aspeknya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah pusat
- 2) Pemerintah daerah
- 3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, apabila menurut produk hukum satuan organisasi wajib menyiapkan laporan keuangan

Entitas laporan dalam penetapannya haruslah dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan dari suatu entitas pelaporan terhadap kas, yuridiksi tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan kekuasaan yang dipisah dengan entitas pelaporan lainnya.

Laporan keuangan pemerintah dalam penyusunannya di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan akan kelompok yang memakai laporan keuangan tersebut. yang menjadi pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah yakni:

- 1) Masyarakat
- 2) Pra wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksa
- 3) Mereka yang menjadi pihak yang berperan sebagai donatur, investor dan peminjam
- 4) Pemerintah

#### c. Peranan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan disusun agar tersedianya data/informasi yang selaras terkait posisi keuangan dan setiap transaksi yang telah dilakukan dalam suatu entitas/perusahaan pelaporan dalam satu waktu tertentu atau periode tertentu. Tiap entitas pelapora memiliki kewajiban

salam memberikan laporan atas berbagai upaya dan hasil dari pencapaian yang telah dilakukan secara tersistematis dan terstruktur dalam satu periode pelaporan demi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparatif dan keseimbangan antara generasi (*intergenerational equity*)

d. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyaapabilan informasi terkait posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang memiliki manfaat bagi yang menggunakannya dalam pembuatan dan mengoreksi keputusan terkait alokasi sumber daya. Sedangkan, tujuan laporan keuangan pemerintah yang lebih spesifik yakni penyajian informasi yang memiliki guna dalam mengambil keputusan dan memberikan bukti bahwa akuntabilitas entitas pelaporan dapat dipercaya atas kekayaan/sumber daya yang dipercayakan, hal ini ditunjukkan dengan:

- 1) Dengan tersedianya informasi atau data terkait posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- 2) Adanya informasi yang terdiri dari perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Tersedianya informasi terkait dengan cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- 6) Adanya data atau informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Adanya informasi yang berguna untuk dilakukan pengevaluasian kemampuan yang dimiliki entitas pelaporan ketika mendanai kegiatannya.

Tujuan umum ini dalam pemenuhannya, laporan keuangan perlu menyediakan informasi terkait entitas pelaporan terkait aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

e. Komponen Laporan Keuangan

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah setidaknya terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA dalam pengungkapan aktivitas keuangan haruslah menggambarkan setidaknya haruslah memiliki komponen berikut ini :

a) Pendapatan

Pendapatan ialah keseluruhan penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang memberi penambahan pada ekuitas dana lancar pada periode anggaran yang terkait menjadi hak pemerintah dan tidak harus dibayarkan kembali ke pemerintah.

b) Belanja

Belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan selama periode anggaran tanpa harus dilakukan pengembalian kepada negara..

c) Transfer

Transfer merupakan uang yang keluar atau masuk dari entitas pelapor dari/kepada entitas pelaporan lain. Ini termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.

d) *Surplus/defisit*

*Surplus/defisit* adalah adanya selisih baik itu kurang atau lebih yang terjadi antara pendapatan dan belanja dalam satu masa pelaporan.

e) Pembiayaan

Pembiayaan ialah keseluruhan penerimaan yang harus dibayarkan kembali atau adanya pengeluaran yang dapat diterima kembali baik itu dalam periode terkait atau periode yang akan datang. Hal ini dimaksudkan penganggaran pemerintah terutama menutupi defisit atau dimanfaatkan surplus anggaran.

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu masa pelaporan yang memiliki selisih baik itu lebih atau kurang.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan Sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan dengan desentralisasi neraca disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang

kemudian digabung oleh entitas pelaporan Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net asset) Ekuitas dana merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban

3) Arus Kas Laporan Arus Kas (LAK)

Arus Kas Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyaapabilan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

4) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalma pelaporan laporan keuangan yang disampaikan. Dalam hal ini tersedia penjelasan mengenai pos-pos laporang keuangan dalam hal pengungkapan yang memadai CaLK ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disaapabilan dalam LRA, Neraca, dan LAK Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya

Bagian kebijakan akuntansi pada CALK setidaknya-tidaknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam laporan keuangan yang disusun menggunakan basis pengukuran;
- b) Sampai tahap apa kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- c) Diperlukan setiap kebijakan agar laporan keuangan dapat dipahami.<sup>28</sup>

## 6. Perspektif Islam

### a. Pengendalian internal dalam Perspektif Islam

Islam memandang pengendalian/pengawasan dilakukan agar kesalahan atau hal yang berbelok dapat diluruskan dan dilakukan perbaikan terkait hal yang salah serta kembali ke jalan yang lurus atau benar. Pengawasan atau pemantauan di bagi menjadi dua bagian yakni, pertama, pemantauan atau pengawasan oleh entitas/perusahaan. Kedua, pemantauan yang dilakukan oleh diri pribadi (*selfcontrol*).

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga



- 1) Pengendalian (*control*) yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT QSAl-Mujaadillah/58:7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apayang Telah mereka kerjakan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>29</sup>

- 2) Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada

Pengendalian dalam intern memiliki beberapa landasan, diantaranya:

- a) Tawa Shaubil Haqqi, adanya saling menasehati akan hakikat kebenaran dan norma yang jelas

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010)

- b) Tawa Shaubis Shabri, saling nasehat menasehati dengan dasar kesabaran dengan kata lain pengendalian yang dilakuak secara berulang
- c) Tawa Shaubil Marhamah, saling memberi nasehat atas dasar kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan secara personal yang bertujuan sebagai pencegahan (perventif)

Pengendalian dalam Islam lebih ditujukan pada kesadaran diri tentang keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Beriman dan bertakwa kepada Allah dapat menghindarkan kita dari melakukan hal-hal yang curang dan menipu serta kesadaran dari luar diri kita dimana ada atasan yang mengontrol kinerja. kami untuk mendukung pengawasan yang baik, sehingga setiap orang dalam organisasi haruslah memiliki rasa takut kepada Allah bahwa Allah melihat apa pun pekerjaan kami. Selain itu, kesadaran untuk mengontrol orang lain dan menetapkan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pengendalian aktivitas dapat berjalan lancar dengan baik.<sup>30</sup>

#### b. Prinsip Akuntansi Syariah

Seperti firman Allah SWT dalah surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai pengendalian internal kas yang berlandasan prinsip akuntansi syariah QS Al-Baqarah/ 2:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

<sup>30</sup> Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrrul Hakim 2015), h. 211.

وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ كُفُّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Apabila yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Apabila tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya apabila seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali apabila mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (apabila) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Apabila kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>31</sup>

Selaras dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa aktualisasi akuntansi Islam mempunyai sekumpulan prinsip dasar yang menjadi pembeda akuntansi ini dengan akuntansi konvensional. Sebab dalam akuntansi ini menggunakan ilmu syariah sebagai dasar prinsipnya. Berikut prinsip yang dimaksud:

1) Prinsip pertanggungjawaban

Merupakan salah satu bentuk implementasi dimana keseluruhan aktivitas yang telah manusia perbuat akan mereka pertanggungjawabkan. Hal ini seperti halnya orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas usaha, perlu adanya tanggungjawab dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Salah satu pertanggungjawabannya yakni adanya laporan keuangan yang disusun oleh seorang akuntan.

2) Prinsip keadilan

Memiliki pengertian terkait tindakan moralitas yakni sifat jujur yang dijadikan sebagai faktor utama. Tidak adanya sifat jujur menjadikan informasi akuntansi dalam sebuah jurnal atau laporan keuangan memutar arah atau informasi yang menyesatkan dan memberi kerugian pada masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan lebih bersifat fundamental dan memiliki pijakan ada nilai etika/ajaran Islam serta moral. Definisi tersebut yang lebih memberi dorongan terjadinya tindakan-tindakan pada wujud akuntansi modern hingga ke sistem akuntansi “solusi” yang jauh lebih baik.

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010)

### 3) Prinsip kebenaran

Prinsip ini memiliki korelasi dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran dapat mewujudkan keadilan dalam pengukuran, pengakuan dan pelaporan setiap transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik apabila dibarengi dengan rasa kebenaran.<sup>32</sup>

Contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. mengenai seperti apa seorang muslim dalam pelaksanaan pengendalian/manajemen dari ketika melaksanakan sebuah pekerjaan. Rasulullah Saw. memberikan gambaran manajemen menempatkan manusia sebagai fokusnya tidak hanya menjadi faktor produksi saja yang tenaganya diperas agar target produksi dapat terkejar. Pengelolaan yang dilakukan oleh Nab Muhammad Saw. dengan staf yang dimiliki itu tidak hanyalah sesaat tetapi mempertahankannya.

### C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang” sebagai alur pemikiran dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendefinisian sesuai judul yang diangkat agar terhindar dari kekeliruan dan memberikan kemudahan dalam memahami isi pembahasan. Oleh sebab itu, dapat diuraikan mengenai arti judul tersebut.

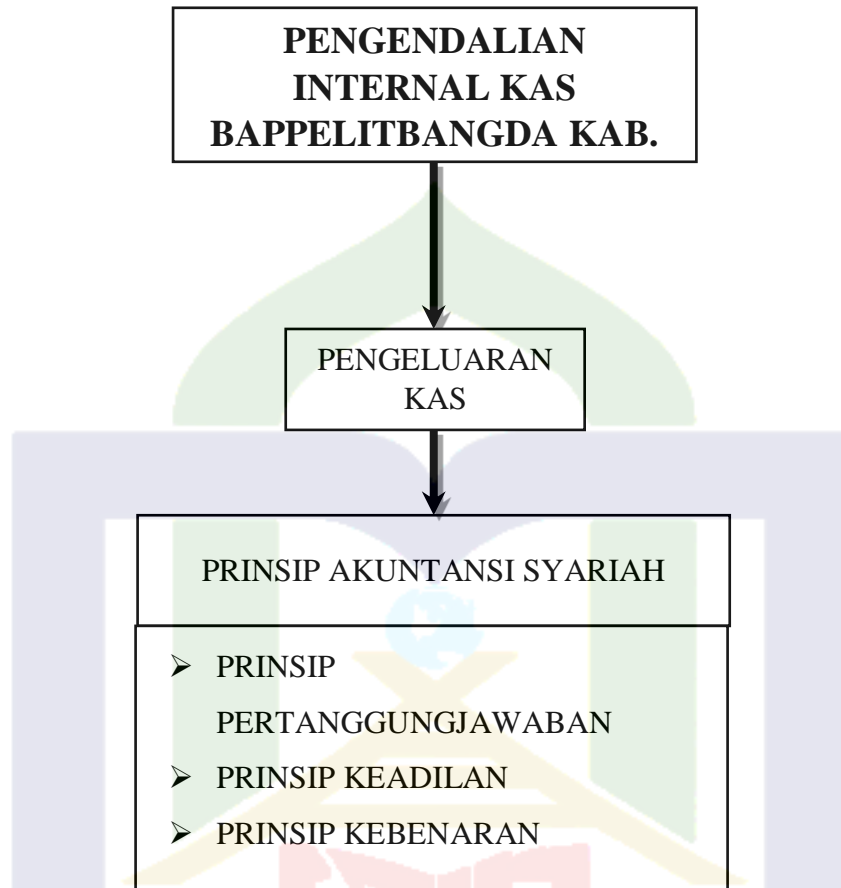
---

<sup>32</sup> Zulhelmy dan Suhendi, *Dasar-Dasar Akuntansi Islamic View* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 28.

1. Analisis ialah upaya yang dilakukan agar masalah dapat diurai atau fokus kajian dilakukan dengan terpisah atau terbagi bagi agar tatanan model suatu yang diuraikan itu terlihat jelas dan karena hal itu dapat dipahami lebih baik maknannya dan dimengerti permasalahannya.<sup>33</sup>
2. Prinsip Akuntansi Syariah Berdasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip akuntansi syariah yaitu, prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran
3. Pengendalian Internal Kas adalah sarana, alat dan skema yang dipergunakan dalam memberikan keamanan, menjaga dari perbuatan boros, terjami teliti, serta mendorong efisiensi terpenuhinya kebijakan manajemen kas.

---

<sup>33</sup> Aan Komariyah, Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h.200

**D. Kerangka Pikir**

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Selaras dengan kerangka berpikir bahwa dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengendalian internal kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Pinrang dengan meninjau dari segi sistem arus kas atau cash flow dengan indikator pengeluaran kas, yang kemudian akan diselaraskan dengan prinsip akuntansi syariah melihat dari tiga prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa kongkrit di lapangan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Riset kualitatif merupakan sesuatu tahapan riset serta uraian yang bersumber pada pada tata cara yang menyelidiki sesuatu fenomena sosial serta permasalahan manusia, digunakan buat mempelajari pada keadaan objek yang alamiah, dimana periset merupakan selaku instrumen kunci, metode pengumpulan informasi dicoba secara triangulasi( gabungan), analisis informasi bersifat induktif/ kualitatif serta hasil riset kualitatif lebih menekankan arti/makna dari pada generalisasi. Sebaliknya merujuk pada perkaranya pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi kasus/sebuah permasalahan.

Metode Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian/riset yang dilakuakn tidak menggunakan data yang dibuat-buat/manipulatif atau adanya tindakan yang dilakuka terhadap variabel atau membuat rancangan agar harapan dapat terjadi pada variabel, namun, semua yang terkait variabel berjalan sesuai dengan apa adanya. Penelitian atau riset ini memberi gambaran yang sesuai dengan apa yang ditetapkan atau yang terjadi pada tempat penelitia.<sup>34</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teleologis-normatif yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang didalam Al-Qur'an dan Hadist Nilai-nilai Agama yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian* (Cet IV; Jakarta: Rineka cipta 2000) h.310.



## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Pinrang yang berlokasi Macorowalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang

## **D. Jenis dan sumber data**

Sumber data ialah keseluruhan penjelasan yang didapatkan melalui responden atau dari berbagai dokumen baik itu dalam bentuk statistik ataupun bentuk lain yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.<sup>35</sup>

### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari tempatnya, dilihat dan dilakukan pencatatan untuk pertama kalinya.<sup>36</sup> Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak lain Dalam penelitian ini data yang diperoleh, langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil

---

<sup>35</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

<sup>36</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h.55.

wawancara Wawancara yang dilakukan berupa wawancara terbuka dengan pertanyaan mengenai analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang didapatkan secara tidak langsung serta bersumber dari adanya perantara media. Hal ini berupa dokumen resmi, buku yang memiliki kaitan dengan apa yang diteliti, hasil penelitian yang berupa laporan, karya tulis ilmiah dan produk hukum<sup>37</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi tahapan yang sangat strategis dalam penelitian, dikarenakan peneliti bertujuan untuk memperoleh data/informasi. Dimana peneliti langsung ikut serta ke lokasi penelitian agar mendapatkan berbagai data yang kongkret mengenai apa yang ditelitinya. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ;

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) dapat dipahami ialah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif biasanya tidak formal misalnya berbicara hal-hal yang sederhana. Inti dari penggunaan metode ini ialah adanya materi, pertanyaan, pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai. Data atau orang yang diwawancarai merupakan pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian.

---

<sup>37</sup> Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h.106.

## b. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung dan disengaja serta tersistematis terkait peristiwa atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan kemudian mencatatannya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menggunakan observasi partisipatif. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap permasalahan yang terjadi pada Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang

## c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara mendapatkan tulisan atau catatan yang penting terkait pada permasalahan yang diteliti agar dalam hasil penelitian data yang dihasilkan tidak didasari dengan prediksi atau perkiraan melainkan data yang resmi atau sah. Peneliti dalam teknik ini digunakan untuk mencair data yang relevan dari berbagai sumber catatan terkait dengan sistem pengendalian intern pada lokasi tempat peneliti lakukan.

## F. Uji Keabsahan Data

### 1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang ditemukan dalam penelitian itu adalah kebenaran. fungsi dari uji ini pada dasarnya memberikan derajat kepercayaan yang dilakukan dengan cara membuktikan kenyataan dari tiap hasil yang peneliti temukan dari penelitiannya<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Kurnia Alam Semesta, 2002), h.32.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h.158.

Peneliti dalam mengujian kepercayaan data yang didapatkan, menggunakan beberapa metode atau cara. Antara lain :

a. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan Pada tahap ini peneliti mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disaapabilan sudah benar atau tidak Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh

b. Triangulasi

Triangulasi ialah pengujian dengan cara melakukan perbandingan atau mencocokkan dengan hal yang lain. Peneliti menggunakan triangulasi berikut :<sup>40</sup>

1) Triangulasi Sumber

Pengujian ini dilakukan dengan adanya pengecekan terhadap sumber-sumber yang didapatkan .Untuk menguji kredibilitas data tentang “Analisis Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pinrang” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada karyawan yang ada di wilayah tersebut.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & Dh*.159.

2) Triangulasi Teknik.

Dilakukan pengujian sumber dengan cara yang berbeda yakni observasi, wawancara dan dokumen sebagai penguat apa yang didapatkan dari informan.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Hal ini dimaksudkan sebagai penguatan terhadap data yang dilakukan dengan adanya foto-foto atau dokumen pembuktian.

d. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* ialah tahap ini dilakukan untuk mengecek sumber data yang didapatkan dari sang pemberi data. Pengujian ini agar dapat mengetahui keselerasan data yang didapatkan dengan yang diberikan oleh sang pemberi data.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap penginderaan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyaipkannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>41</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Reduksi data

---

<sup>41</sup> Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.37.

merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>42</sup> Setelah observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah diahami tersebut.<sup>43</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam hal ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 406.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 408.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 412.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Pengendalian internal pengeluaran kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang

Mengambil kebijakan dalam mengelola manajemen haruslah selaras yang dikemudian hari akan berdampak terhadap sistem arus kas atau *cash flow* Selaras dengan sistem arus kas yang di kelola oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang yang di tangani langsung oleh Bendahara

Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan Ibu Hj Hadijah Mahmud, S.Sos selaku kepala kasubag keuangan BAPPELITBANGDA Kab Pinrang

“Penanganan penerimaan dan pengeluaran kas ditangani langsung oleh bendahara atas SK penetapan bahan instruksi”

Pengeluaran arus kas yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Kab.Pinrang demi kepentingan anggaran setiap kegiatan yang ada di OPD (Operasional Daerah) Basis akuntansi yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang disusun berdasarkan dari pernyataan standar akuntansi pemerintah basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hadijah Mahmud, S.Sos, selaku Kasubag Keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang menyatakan dalam hasil wawancara nya bahwa laporan arus kas bersifat internal.

“Laporan arus kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang bersifat internal dan belum di ada izin untuk mempublikasikan laporan tersebut”

Hal ini selaras dengan tahapan yang diatur oleh BPPKD seperti dalam hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hadijah Mahmud, S.Sos, selaku Kasubag Keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang.

“Di Kabupaten Pinrang memiliki tahapan yang berlaku secara umum disemua instansi dibawah naungan PEMDA atau semua tahapan yang mengatur pengelolaan kas di bawah naungan BPPKD (Badan Penetapan, Pengelolaan Keuangan Daerah)”

Bentuk pelaporan keuangan dapat dijelaskan dalam ikhtiar pencapaian kinerja keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang tahun anggaran 2020 seperti dibawah ini:

Tabel 4.1 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	2020	2020	PAGU	
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN-LRA</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LRA</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00	0,00



Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Primbangan-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA</b>				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA</b>				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	4.504.020.194,00	4.084.865.394,00	419.154.800,00	90,69
Belanja Barang dan Jasa	3.450.371.000,00	3.235.751.455,00	214.619.545,00	93,78
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>7.955.931.194,00</b>	<b>7.322.156.849,00</b>	<b>633.774.354,00</b>	<b>92,03</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				

Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.000.000,00	234.000.000,00	1.000.000,00	99,57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.500.000,00	135.202.000,00	21.298.000,00	86,39
Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Operasional BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>391.500.000,00</b>	<b>369.202.000,00</b>	<b>22.298.000,00</b>	<b>94,30</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.347.431.194,00</b>	<b>7691.358.849,00</b>	<b>656.072.345,00</b>	<b>92,14</b>
<b>Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>8.347.431.194,00</b>	<b>7691.358.849,00</b>	<b>656.072.345,00</b>	<b>92,14</b>
<b>SUPLUS/DEFISIT</b>	<b>-8.347.431.194,00</b>	<b>-7691.358.849,00</b>	<b>656.072.345,00</b>	<b>92,14</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Daerah Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00

Pembayaran Kepada Pihak Ke Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak ke Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIYAAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA</b>	<b>-8.347.431.194,00</b>	<b>(7.691.358.849,00)</b>	<b>(666.072.345,00)</b>	

Tabel diatas menggambarkan secara rinci pengeluaran kas yang ada pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab.Pinrang. hal ini tentu memberikan gambaran bahwa tiap pengeluaran kas yang dilakukan pada lembaga ini dicatat dalam laporan iktisar tersebut.

2. Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang dalam analisis prinsip Akuntansi Syariah

Keputusan suatu instansi harus berdasarkan pada data yang mudah dipercaya dan benar Seperti halnya data keuangan yang dapat mewakili keadaan fisik suatu instansi Hampir segala aktivitas keuangan suatu instansi melibatkan kas Salah satu fungsi dan tugas dari suatu pimpinan adalah melindungi setiap kegiatan aktiva baik dari pemborosan, pencurian, dan penyalagunaan Maka dari itu pentingnya melakukan pembukuan akuntansi untuk memantau penerimaan dan pengeluaran kas, sehinggah tidak terjadi pengeluaran kas yang tidak sah. Dari hasil wawancara dengan Ibu Darmiati SE selaku bendahara gaji BAPPELITBANGDA Kab Pinrang

“Di Kab Pinrang memiliki tahapan, tetapi berlaku secara umum disemua instansi dibawah naungan pemda Kab Pinrang Semua tahapan tersebut diatur oleh BPPKD (Badan Penetapan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah)”

Sebuah organisasi memiliki tahapan dalam pengendalian internal kas yang merupakan salah satu unsur penting dan diperlukan. BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah mampu melakukan penerapan sebagian besar dari komponensn sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari sistem otoritas, struktur organisasi, karyawan yang bertanggung jawab dan tahapan pencatatan serta praktik yang sehat.

Penjelasan diatas diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Hj. Hadijah Mahmud, S.Sos selaku Kasubag Keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang menyatakan dalam wawancaranya :

“Lingkungan pengendalian mengenai struktur organisasi sangat jelas namun dalam BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang tidak menerapkan fungsi penerimaan kas dalam pemisahan fungsi kas, hanya menggunakan fungsi pengeluaran kas dan fungsi akuntansi (pencatatan)”

Selain dari pada struktur organisasi yang baik, tiap instansi/lembaga pemerintah juga wajib diadakan penilaian resiko yang bertujuan untuk mengelola resiko, menganalisa serta mengidentifikasi setiap resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern. Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hadijah Mahmud, S.Sos selaku Kasubag Keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang menyatakan dalam wawancaranya:

“Untuk menanggulangi resiko terkhususnya kas maka BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang sudah berusaha sekuat tenaga. Seperti dengan menempatkan setiap pegawai selaras dengan latar belakang pendidikan, setiap dokumen setelah transaksi haruslah dicap lunas sebagai dokumen pendukung, setiap nomor cek yang keluar dipertanggungjawabkan dibagian keuangan.”

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Ibu Rahma AR, S.E selaku bendahara pengeluaran BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang :

“Kepala instansi selalu melakukan peninjauan ulang yang dilakukan secara teratur. Setiap pengeluaran kas dicatat dalam buku kas yang kemudian di kelompokkan selaras dengan klasifikasinya dan harus disertai dengan dokumen pendukung ataupun bukti”

Ibu Darmiati, S.E selaku bendahara gaji BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang juga mengatakan dalam wawancaranya:

“Terdapat brangkas untuk menyimpan semua dokumen penting yang terkait. Sampai dengan sejauh ini setiap sub atau bagian di instansi sudah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Sama halnya dengan bagian akuntansi yang mencatat setiap kegiatan transaksi dan memiliki bukti sebagai pendukung yang kemudian di periksa oleh kepala kasubag keuangan dan akan dipertanggungjawabkan kepada atasan.”

Apabila pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pnrang dikaitkan dengan prinsip akuntansi syariah maka berdasarkan dari prinsip akuntansi syariah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282/2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهٗ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. apabila yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). apabila tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya apabila seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali apabila mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (apabila) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. apabila kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”<sup>45</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang tiap transaksi yang dilakukan haruslah dilakukan pencatatan. Hal ini tentu telah dilakukan pada BAPPELITBANGDA Kab. Pnrang. Dimana dalam setiap pengeluaran kas yang dilakukan akan

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010)

dicatatn dalam laporan keuangan yang disusun. Ayat ini memiliki tiga unsur didalam yang menjelaskan yakni.

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip ini sering dikaitkan dengan amanah. Bertanggungjawab yang dimaksudkan dalam akuntansi ialah berupa bentuk laporan keuangan. Hal ini sudah diterapkan dalam pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang dimana terdapat fungsi akuntansi (pencatatan), dalam hal mencegah terjadinya penyelewengan kas.

b. Prinsip keadilan

Prinsip ini didalam akuntansi sering dikaitkan dengan transaksi yang dilakukan haruslah dicatat dengan benar. Hal ini juga sudah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang, dimana setiap transaksi atau kas keluar dicatat didalam buku kas dan memiliki bukti yang di cap lunas sebagai dokument pendukung.

c. Prinsip kebenaran

pada prinsip ini tidak lepas dari prinsip keadilan, diaman senantiasa dihadapkan pada pelaporan, pengukuran dan pengakuan yang berlandaskan pada nilai kebenaran. Dalam hal ini BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang dalam melakukan pelaporan baik telah selaras dengan tahapan dan peraturan yang diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari setiap pencatatan yang diklasifikasikan berdasarkan setiap aktivitas transaksinya.

## B. Pembahasan Penelitian

1. Pengendalian internal pengeluaran pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab. Pinrang.

Penyusunan laporan keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang mengacu kepada akuntansi pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan, beban, aset kewajiban dan ekuitas. Laporan keuangan daerah adalah suatu tahap pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan pengelolaan keuangan secara baik dan selaras dengan peraturan.

Laporan keuangan yang dikemukakan oleh Wahyudiono bahwasany “Laporan pertanggungjawaban manajer atau atasan entitas/perusahaan atas pengelolaan entitas/perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar entitas/perusahaan”.<sup>46</sup> Berbagai pihak menggap informasi keuangan yang handal disampaikan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah dengan berbeda-beda fungsi.hal ini agar penyampaian laporan keuangan harus memiliki mutu. Syarat yang menjadikan laporan keuangan itu bermutu atau berkualitas ialah yang diakuntansikan dengan tepat dan pelaporannya lengkap serta independen saat diaudit.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu mempunyai sumber daya manusia yang bermutu dengna adanya pendidikan akuntansi yang

---

<sup>46</sup> Wahyudiono, Bambang.. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h.34



melatarbelakanginya. Keikutsertaan dalam pelatihan dan pelatihan tentang akuntansi dan perlu adanya pengalaman kerja dibidang akuntansi. Sumber daya yang tidak bermutu akan berdampak pada kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Ketidaksesuaian juga dapat terjadi antara laporan keuangan dan standar akuntansi yang dijadikan rujukan. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah Pemanfaatan teknologi. Faktor ini lebih mengarah pada ketepatan waktu yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatan waktu LKPD.

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah masih banyak disiapakan data yang tidak selaras. Selain itu, juga masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.<sup>47</sup>

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya selaras dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam

---

<sup>47</sup> Muhammad Alif Khadafi, *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang*, Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 1, 2022, h.9-10

menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.<sup>48</sup>

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1)<sup>49</sup> dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyaapabilan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.<sup>50</sup>

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang selaras dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

---

<sup>48</sup> Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia*, 2014, h.1

<sup>49</sup> Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”, (Jakarta: 2003), h.23

<sup>50</sup> Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”, (Jakarta: 2004), h.34

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut.<sup>51</sup>

Bagian-bagian laporan keuangan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang:

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan buka pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang
- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas dana.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah”, (Jakarta: 2010), h.3

<sup>52</sup> BAPPEDA Kabupten Pinrang, Laporan Keuangan SKPD Per 31 Desember 2020 (Pemerintah Kabupaten Pinrang : Pinranga, 2020) h. 27-28

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit dan pembiayaan pemerintah Kabupaten Pinrang yang kemudian dibandingkan dengan anggaran.

Laporan realisasi anggaran mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus atau defisit
- 5) Penerimaan pembiayaan
- 6) Pengeluaran pembiayaan
- 7) Pembiayaan neto
- 8) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)<sup>53</sup>

c. Laporan Operasional (LO)

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Pendapatan –LO
- 2) Beban
- 3) Surplu/defisit dari operasi
- 4) Kegiatan nonoperasional

---

<sup>53</sup> BAPPEDA Kabupaten Pinrang, Laporan Keuangan SKPD Per 31 Desember 2020 (Pemerintah Kabupaten Pinrang : Pinranga, 2020) h. 52

- 5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- 6) Pos luar biasa
- 7) Surplus/defisit-LO<sup>54</sup>
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyaapabilan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan<sup>55</sup>

Rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang tahun 2020:

- a. Aset Lancar
  - 1) Kas di bendahara pengeluaran Rp 0,00

Rekening ini merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2019 dan 2020 yang merupakan sisa UP yang masih ditangan bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas daerah dan pajak yang belum disetor ke kas negara.

<sup>54</sup> BAPPEDA Kabupten Pinrang, Laporan Keuangan SKPD Per 31 Desember 2020 (Pemerintah Kabupaten Pinrang : Pinranga, 2020) h. 58

<sup>55</sup> BAPPEDA Kabupten Pinrang, Laporan Keuangan SKPD Per 31 Desember 2020 (Pemerintah Kabupaten Pinrang : Pinranga, 2020) h. 63

2) Kas di bendahara penerimaan Rp 0,00

Rekening ini merupakan saldo kas dari per 31 Desember 2019 dan 2020 yang merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke kas daerah.

3) Piutang pajak retribusi Rp 0,00

4) Beban dibayar di muka Rp 0,00

5) Persediaan Rp 1.468.500,00

Tabel 4.2 Persediaan

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Saldo per 31 Des 2020
			Debet	Kredit	
1	Alat tulis kantor	4.976.500,00	71.992.000,00	75.500.000,00	1.468.500,00
2	Bahan cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alat listrik	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4	Alat kelengkapan komputer	300.000,00	6.550.000,00	6.850.000,00	0,00
5	Bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perangko dan materai	90.000	3.600.000,00	3.690.000,00	0,00
7	Peralatan kebersihan	70.000	5.902.000,00	5.972.000,00	0,00
	Jumlah	5.436.500,00	90.044.000,00	94.012.000,00	1.468.000,00

Tabel 4.2 menggambarkan saldo persediaan barang yang digunakan dengan maksdu untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan operasional dan dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

b. Investasi jangka panjang

1) Investasi jangka panjang nonpermanen Rp 0,00

2) Investasi jangka panjang permanen Rp 0,00

## c. Aset tetap

- 1) Tanah Rp 0,00
- 2) Peralatan dan mesin Rp 2.979.483.900,00

Tabel 4.3 peralatan dan mesin

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Saldo Per 31 Des 2020
			Debet	Kredit	
1	Alat-alat berat	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
2	Alat-alat angkut	533.474.000,00	0,00	0,00	533.474.000,00
3	Alat bengkel dan alat ukur	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4	Alat pertanian dan peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alat-alat kantor dan RT	218.513.000,00	214.000.000,00	0,00	2.170.951.900,00
6	Alat studio dan komunikasi	238.513.000,00	20.000.000,00	0,00	238.513.000,00
7	Alat-alat kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alat labolatorium	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alat keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.745.438.900,00	2.745.438.900,00	234.000.000,00	2.979.438.900,00

Tabel 4.3 Menjelaskan adanya peningkatan dan hal ini dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan dari belanja modal peralatan dan mesin.

- 3) Gedung dan bangunan Rp 4.669.852.800,00

Tabel 4.4 Gedung dan bangunan

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Saldo Per 31 Des 2020
			Debet	Kredit	
1	Bangunan gedung	4.534.650.800,00	135.202.000,00	0,00	4.669.852.800,00
2	Bangunan monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.534.650.800,00	135.202.000,00	0,00	4.669.852.800,00

Tabel 4.4 terkait gedung dan bangunan juga mengalami peningkatan dengan adanya biaya atau dana untuk rehab gedung.

4) Jalan, irigasi dan jaringan	Rp 0,00
5) Aset tetap lainnya	Rp 0,00
6) Kontruksi dalam pengerjaan	Rp 0,00
7) Akumulasi penyusutan	Rp (2.457.308.386,41)
d. Aset lainnya	
1) Tagihan jangka panjang	Rp 0,00
2) Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp 0,00
3) Aset tak berwujud	Rp 110.868.000,00

Tabel 4.5 Aset Tak Berwujud

No	Uraian		Mutasi 2020		Saldo Per 31 Des 2020
			Debet	Kredit	
1	Aplikasi akrual	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aplikasi aset	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aplikasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	67.120.000,00	0,00	33.560.000,00	33.560.000,00
4	Aplikasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	96.635.000,00	0,00	19.327.00,00	77.308.000,00
	Jumlah	163.755.000,00	0,00	52.887.000,00	110.868.000,00

Tabel 4.4 Menjelaskan saldo ini terkait pengadaan aplikasi dalam menunjang tiap kegiatan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab. Pinrang.



4) Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	Rp (189.067.000,00)
5) Aset lain lain	Rp 291.666,67
b. Kewajiban	
1) Utang perhitungan pihak ketiga	Rp 0,00
2) Utang bunga	Rp 0,00
3) Bagian lancar utang jangka panjang	Rp 0,00
4) Pendapatan diterima di muka	Rp 0,00
5) Utang belanja	Rp 0,00
6) Utang jangka pendek lainnya	Rp 0,00
c. Ekuitas	Rp 5.304.611.480,26

Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyaapabilan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

2. Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab Pinrang dalam analisis prinsip Akuntansi Syariah

Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif baik secara akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban terlebih lagi dalam pengeluaran kas yang memerlukan pengendalian internal Aset lancar apabila dibandingkan dengan aset lainnya adalah kas. Karenanya, kas paling banyak diselewengkan, dimanipulasi dan dicuri Kas selalu disaapabilan pada urutan pertama dalam neraca saldo.<sup>56</sup> Karena sifatnya yang mudah diselewengkan seperti mudah dipindahtangankan sehingga tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka diperlukan pengawasan.

Soemarso juga mengemukakan bahwa kas mudah diabaikan (*misappropriate*) dari pada aktiva lain, semacam *inventory* atau peralatan. karena alasan inilah, menjaga kas dan membentuk system pengendalian internal terhadap kas merupakan perhatian yang utama.<sup>57</sup> Sistem yang pada umumnya digunakan ialah sistem pengendalian internal kas yang dapat membedakan dan memisahkan antara fungsi pelaksanaa, pencatatan, dan penyimpanan. Dengan adanya fungsi yang terpisah maka tidak akan mudah untuk menggelapkan dana kas.

Anastasi dan Lilis mengemukakan bahwa pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan kekayaan/harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan tahapan yang

---

<sup>56</sup> Seprida Hanum, *Sistem Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h.59

<sup>57</sup> Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, (Jakarta Salemba Empat. 2010), h.11

dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa entitas/perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya (Hery, 2011:87). Tujuan pengendalian intern menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*).<sup>58</sup>

a. Unsur-unsur pengendalian internal kas

1) Lingkungan pengendalian

Untuk menimbulkan situasi yang kondusif serta perilaku yang positif pimpinan suatu instansi harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian untuk menerapkan sistem pengendalian internal didalam lingkungan kerjanya.

Dengan memiliki struktur organisasi akan memberikan dampak yang baik bagi instansi dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi memberikan fungsi sebagai pembagian tanggungjawab dan otoritas untuk memberikan kejelasan mengenai pekerjaan sehingga menghindari saling lempar tanggungjawab.

2) Penilaian Resiko

Suatu instansi tentunya akan melakukan penilaian resiko dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengelola resiko. Resiko yang dimaksudkan yaitu baik secara faktor intern ataupun ekstern. Seperti dalam penerimaan pegawai baru serta kelengkapan berkas yang berhubungan dengann transaksi kas.

---

<sup>58</sup> Anastasia Diana dan Lilis, Setiawati. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Yogyakarta: Andy. 2010), h.82-83

### 3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian ialah tindakan yang diharuskan untuk mencegah resiko. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan tahapan untuk memastikan tindakan mengatasi resiko tersebut telah dilaksanakan dengan efektif.

Kegiatan Pengendalian merupakan kebijakan dan tahapan yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa pedoman dari manajemen telah dilaksanakan. Pengeluaran kas di BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang untuk perjalanan dinas masing-masing bidang dalam membantu Bupati dalam Pengelola Pendapatan Daerah. Akibat dari seringnya terjadi transaksi pengeluaran kas sehingga diperlukan evaluasi dan tinjauan oleh atasan instansi. Adapun kegiatan pengendalian mencakup pelaksanaan review, pengendalian fisik dan pemisahan tugas

### 4) Informasi dan Komunikasi

Pengendalian internal yang efektif dapat tercapai apabila informasi dan komunikasi yang dilakuka itu berjalan dengan baik. seperti halnya adanya pencatatan yan baik, panduan kebijakan yang tertera pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang dan laporan keuangan yang disusun secara priodik. komponen dari informasi dan komunikasi yang ada di BAPPENDA Kab. Pinrang adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah.
- b) Pengklasifikasian transaksi keuangan
- c) Komunikasi

### 5) Pemantauan

Pemantauan ialah tahap yang dijadikan sebagai penentu bermutunya pengendalian internal setiap saat. Pemantuan meliputi penentuan desain dan tepat waktunya operasi pengendalian serta tindaa koreski yang diambil. Tahap ini dilaksanakan dengan adanya aktivitas yang dilangsungkan secara berkesinambungan, terspidahnya evaluasi atau dilakukan penggabungan antara dua evaluasi tersebut. terpisahnya evaluasi dilakukan oelh aparat terkait dan atau pihak luar. Terpisahnya evaluasi dapat dilaksanaka dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sesuai dengan apa yang tercatat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari produk hukum pemerintah.

Usaha yang dilakukan perusahaan dalam memberikan keamanan pada kekayaan yang mereka miliki dengan melakukan sistem pengendalian internal. Hal ini agar mampu memberikan pencegahan terjadinya pencurian, penggelapan dana oleh orang yang tidak memiliki tanggungjawab. Pengendalian ini juga dilakukan agar dana tidak digunakan dengan semen-mena meski tidak mampu untuk dihapuskan tetapi setidaknya dapat dilakukan pencegahan dari aksi tersebut.

Pengendalian intern tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka dan melindungi kekayaan/harta kekayaan entitas/perusahaan dari segi pembukuan sata tetapi juga memperhatikan struktur organisasi entitas/perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja dan menganalisa keberhasilan dari suatu kebijakan manajemen.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Amin dan Widya Tunggal, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993), h.99

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 6 :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”<sup>60</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dalam sistem pengendalian intern adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data-data akuntansi, mendorong efisiensi dan kepatuhan dalam pemenuhan kebijakan manajemen. Oleh karenanya pengendalian intern harus dipantau serta dievaluasi agar manfaat dari pengendalian intern tersebut berdaya dan berhasil juga dapat dipertanggung jawabkan.

Islam memberikan petunjuk agar dalam pengendalian haruslah dengan adanya kesadaran diri bahwa setiap apa yang dilakukan dalam hal tersebut dilihat oleh Allah. tentu dengan kesadaran ini yang dengan taqwa kepada Allah dapat memberikan pencegahan kepada tiap individu dalam melakukan hal yang terkandung didalamnya kecurangan dan unsur penipuan serta adanya kesadaran bahwa tidak hanya dalam diri kita tetapi unsur luar juga memperhatikan setiap kegiatan dalam perusahaan. Hal ini dilakukan oleh atasan yang senantiasa menjaga dan memberi pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan oleh bawahannya atau karyawan.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010)

Agar menunjang jalannya pengawasan dengan baik, tiap personel yang terdapat dalam organisasi hendaknya mempunyai rasa takut kepada-Nya bahwasanya Allah memandang apapun pekerjaan kita. Tidak hanya itu pemahaman buat mengendalikan sesamanya, serta penetapan ketentuan yang tidak berlawanan dengan syariah. Dengan demikian kegiatan pengendalian bisa berjalan dengan baik..<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrrul Hakim 2015), h. 211.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang mengenai sistem arus kas (*cash flow*) dan pengendalian internal kas dalam analisis prinsip akuntansi syariah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

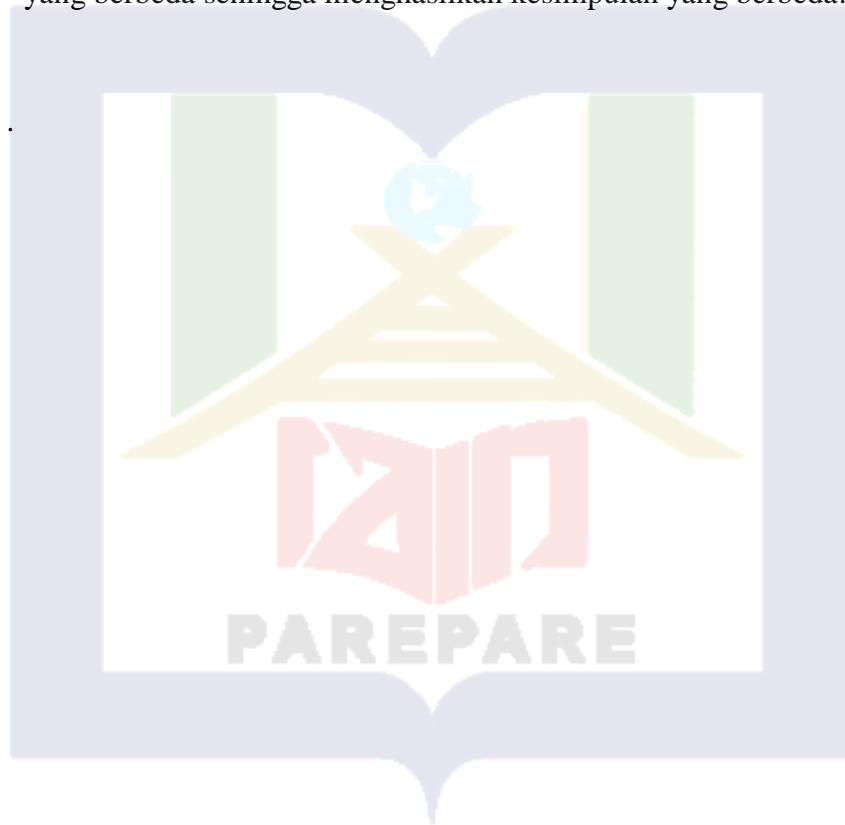
1. Laporan keuangan yang diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Yang telah selaras dengan tahapan yang diterapkan oleh PEMDA dan BPPKD Kab. Pinrang. Namun laporan arus kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang bersifat internal dan sensitif sehingga belum dipublikasikan.
2. Pengendalian internal kas pada BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan secara baik, dimana hanya terdapat dua fungsi pengendalian yaitu fungsi pengeluaran dan fungsi akuntansi (pencatatan). Unsur pengendalian internal kas yang telah diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.  
Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang telah diterapkan dengan baik, terdapat
3. Prinsip yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.



## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah atau dinas terkait dalam hal ini BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang agar mempertahankan efektifitas dari hasil pelaksanaan pengendalian internal kas.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu untuk menggunakan metode yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Komariyah & Djama'an, Satori *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Alfabeta 2014
- Abdul, Halim, Usman *Manajemen Strategis Syariah* Jakarta: Zikrrul Hakim 2015
- Abdurrahman Dudung *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta; Kurnia Alam Semesta 2002
- Agus Sartono *Manajemen Keuangan* Yogyakarta: BPFE 1996
- Agus Utomo *Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PDAM Tirta Jeneberang Gowa* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar 2019
- Ali Mauludi AC *Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif Historis Aplikatif Akuntansi Syariah* Vol1No 1 2014
- Al-Qur'an Al-Karim Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Tiga Serangkai 2014
- Bambang Kekayaan/hartadi *Sistem Pengendalian Intern* Yogyakarta: BPFE 1999
- BAPPEDA Kabupten Pinrang, *Laporan Keuangan SKPD Per 31 Desember 2020* (Pemerintah Kabupaten Pinrang : Pinranga, 2020)
- Basrowi dan Suwandi *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta 2008
- Cenik Ardana dkk *Sistem Informasi Akuntansi* Jakarta: Mitra Wacana Media 2016
- Chelsi Nizara OK *Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDALitbang Provinsi Riau* Skripsi Sarjana; Akuntansi: UIN SUSKA RIAU 2012
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV penerbit Diponegoro 2010
- Desi Pakadang *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon* *Jurnal EMBA* Vol1 No4 2013
- Dwi Martani *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* Jakarta: Salemba Empat 2014

- Halim Abdul dan Kusufi *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Keempat Jakarta: Salemba Empat 2007
- Halim *Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta: Salemba Empat 2018
- Hery *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen* Jakarta: Kencana 2014
- <https://www.gramediacom/literasi/pengendalian-internal/> diakses pada minggu 07 Agustus 2022
- Iwan Aprianto *et al eds Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* Yogyakarta: CV Budi Utama 2020
- James A Hall *Sistem Informasi Akuntansi* Jakarta: Salemba Empat 2007
- Joko Subagyo *Metode Penelitian Daklam Teori Praktek* Jakarta: Rineka Cipta 2006  
Kasmir *“Pengantar Manajemen Keuangan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010
- LM Samryn *Akuntansi Manajemen* Jakarta: Kencana 2012
- Maria Anastasia *Analisis Sistem dan Tahapan Pengendalian Interen Penerimaan Kas Pada UD Kanca Karya Banjarbaru* *Jurnal KINDAI* Vol9 No2 2013
- Marzuki *Metodologi Riset* Yogyakarta: Hanindita Offset 1983
- Mulyadi *Sistem Informasi Akuntansi*
- Nurul Mutmainnah *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas Pada PT Pos Indonesia persero cabang Sinjai* Skripsi: Universitas Negeri Makassar 2016
- Peraturan Menteri Keuangan No 177/PMK05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Ratmono Dwi & Sholihin Mahfud *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* Cetakan Pertama Yogyakarta: UPPS STIM YKPN 2015 h154
- Republik Indonesia *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006*
- Saifuddin Azwar *Metode Penelitian Cet Ke-II*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000
- Seprida Hanum *Sistem Informasi Akuntansi* Bandung: Citapustaka Media 2015

- Suad Husnan *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2012
- Sudarman Damin *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan Humaniora* Bandung: CV Pustaka Setia 2012
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Elfabeta 2007
- Suharsimi Arikunto *Manajemen penelitian* Cet IV; Jakarta: Rineka cipta 2000
- Sukrisno Agoes *Auditing* Jakarta: Salemba Empat 2012
- Sumarni Murti dan Jhon Soeprihanto *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Entitas/perusahaan Edisi Kelima* Yogyakarta: Penerbit Liberty 2005
- Walter T Harrison Jr Linda Smith Bamber *Accounting fifth edition* Prentice Hall Inc New Jersey: Indeks 2006
- Zainuddi Ali *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Zulhelmy dan Suhendi *Dasar-Dasar Akuntansi Islamic View* Indramayu: Penerbit Adab 2021





	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p align="center">JlnAmalBakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404          PO Box909 Parepare 91100,website: <a href="http://www.iainpareacid">www.iainpareacid</a>, email: <a href="mailto:mail@iainpareacid">mail@iainpareacid</a></p>
<p align="center"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : RICKY ANWAR  
 NIM : 172800058  
 FAKULTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI  
 AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN  
 SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH  
 TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL KAS  
 PADA BADAN PERENCANAAN,  
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH  
 (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

- 1 Apakah di BAPPELITBANGDA Kab Pinrang memiliki struktur organisasi mengenai pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan, fungsi pengeluaran kas dan fungsi akuntansi (pencatatan)?
- 2 Apakah di BAPPELITBANGDA Kab Pinrang terdapat pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dari atasan kepada stafnya, terkhusus dalam hal yang berhubungan dengan penanganan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai instruksi yang baik dan jelas?

- 3 Apakah di BAPPELITBANGDA Kab Pinrang memiliki tahapan yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan kas?
- 4 Apakah dalam memeriksa ketelitian pencatatan kas dilakukan oleh fungsi pemeriksaan internal yang merupakan fungsi yang tidak terlibat didalam pencatatan, penyimpanan kas dan akuntansi?
- 5 Apakah terdapat panduan atau pedoman mengenai pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran kas
- 6 Apakah instansi yang terkait melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan tahapan yang telah ditetapkan?

Parepare, 07 Agustus 2022

Mengetahui,  
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr Syahriyah Semaun, S.E., M.M.  
NIP 19711111 199803 2 003

Abdul Hamid, S.E, M.M.  
NIP 19720929 200801 1 012

PAREPARE

## Lampiran 02 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.961/In.39.8/PP.00.9/3/2021 4 Maret 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)  
**2. Abdul Hamid, S.E., M.M.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ricky Anwar  
 NIM. : 17.2800.058  
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **23 Desember 2020** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANILISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL  
 KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPEDDA)  
 KABUPATEN PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

*emil*

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



## Lampiran 03 Izin Meneliti Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4037/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RICKY ANWAR  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 16 JUNI 1999  
 NIM : 17.2800.058  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA  
 KEUANGAN SYARIAH  
 Semester : XI (SEBELAS)  
 Alamat : JL. LASINRANG, KELURAHAN TEMMASSARANGNGE,  
 KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

01 September 2022  
 Dekan,  
  
 Muztalifah Muhammaduny

## Lampiran 04 Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0501/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-09-2022 atas nama RICKY ANWAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1413/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 27-09-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0497/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 27-09-2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: RICKY ANWAR
4. Judul Penelitian	: ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: KASUBAG. KEUANGAN, BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**Balai Sertifikasi Elektronik**







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



## Lampiran 05 Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)**

Jalan Bintang No. 1 Telp. (0421) 921 066 Pinrang 91212

Pinrang, 28 Oktober 2022

Nomor	: 050 / 450 / Bappelitbangda	Kepada Yth ;
Lampiran	: -	Dekan Bidang Akademik
Perihal	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
		Di - Parepare

Bersama ini kami menyampaikan bahwa :

NAMA	: RICKY ANWAR
NIM	: 17.2800.058
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
PEKERJAAN	: MAHASISWA
ALAMAT	: JL LASINRANG TEMASSARANGNGE PALTETANG PINRANG

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian selama 1 (satu) bulan dengan judul **“ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBAGDA) KABUPATEN PINRANG”** pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**MUHAMMAD IDRIS, SE., M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19621231 199003 1 107



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**NERACA**  
**PER DESEMBER 2020 DAN 2019**

ACCOUN	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
<b>ASET</b>			
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>5,304,611,480.26</b>	<b>5,378,511,763.95</b>
<b>1 1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>1,468,500.00</b>	<b>5,436,500.00</b>
1 1 1	Kas dan Setara Kas	0.00	0.00
1 1 1 03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
1 1 1 06	Setara Kas	0.00	0.00
1 1 1 07	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0.00	0.00
1 1 2	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
1 1 3	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
1 1 4	Piutang Lainnya	0.00	0.00
1 1 5	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
1 1 6	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
1 1 7	Persediaan	1,468,500.00	5,436,500.00
<b>1 2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 2 1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
1 2 2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
<b>1 3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5,191,983,313.59</b>	<b>5,305,663,597.28</b>
1 3 1	Tanah	0.00	0.00
1 3 2	Peralatan dan Mesin	2,979,438,900.00	2,745,438,900.00
1 3 3	Gedung dan Bangunan	4,669,852,800.00	4,534,650,800.00
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00
1 3 5	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
1 3 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
1 3 7	Akumulasi Penyusutan	(2,457,308,386.41)	(1,974,426,102.72)
<b>1 4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ACCOUN	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1 4 1	Dana Cadangan	0.00	0.00
1 5	<b>ASET LAINNYA</b>	111,159,666.67	67,411,666.67
1 5 1	Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
1 5 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
1 5 3	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	110,868,000.00	67,120,000.00
1 5 3 01	Goodwill	0.00	0.00
1 5 3 02	Lisensi dan franchise	0.00	0.00
1 5 3 03	Hak Cipta	0.00	0.00
1 5 3 04	Patent	0.00	0.00
1 5 3 05	Aset Tidak Berwujud Lainnya	299,935,000.00	203,300,000.00
1 5 3 06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(189,067,000.00)	(136,180,000.00)
1 5 4	Aset Lain-lain	291,666.67	291,666.67
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>5,304,611,480.26</b>	<b>5,378,511,763.95</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
2	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
2 1 2	Utang Bunga	0.00	0.00
2 1 3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
2 1 4	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
2 1 5	Utang Perhitungan Pihak Ke Tiga (PPK)	0.00	0.00
2 1 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
2 2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 2 1	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
2 2 2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
3	<b>EKUITAS</b>	<b>5,304,611,480.26</b>	<b>5,378,511,763.95</b>
3 1	<b>EKUITAS</b>	<b>5,304,611,480.26</b>	<b>5,378,511,763.95</b>
	<b>TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS</b>	<b>5,304,611,480.26</b>	<b>5,378,511,763.95</b>

ACCOUN URAIAN

TAHUN 2020

TAHUN 2019



Muhammad Idris, SE., M.Si  
Pangkat - Pembina Utama Muda  
NIP: 19621231-199003 1 10





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PER 2020 DAN 2019  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
4 1	PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4	Lain-lain PAD Yang Sbb - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020

6

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	Donasi Darurat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	0,00	0,00	0,00			
	<b>BELANJA</b>						
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.341.733.444,00	7.322.156.848,00	92,03	3.219.576.596,00	3.219.576.596,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	4.878.916.194,00	4.084.865.394,00	90,69	794.050.800,00	794.050.800,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.632.817.250,00	3.235.751.455,00	93,76	2.397.065.795,00	2.397.065.795,00	
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Hibah	30.000.000,00	1.540.000,00	100,00	28.460.000,00	28.460.000,00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	245.897.750,00	386.202.000,00	94,30	-123.504.250,00	-123.504.250,00	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	109.197.750,00	234.000.000,00	99,57	-124.802.250,00	-124.802.250,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.500.000,00	135.202.000,00	86,39	1.298.000,00	1.298.000,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Amungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.6	Belanja Modal Operasional BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020



KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	10.787.431.194,00	7.661.356.846,00	92,14			
	<b>TRANSFER</b>						
	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>						
6.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>						
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(10.787.431.194,00)	(7.661.356.846,00)				
	<b>PEMBIAYAAN</b>						
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>						
7.1	Penggunaan SBLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.5	Penerimaan Kembali Pinang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2020

AKUN	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
9 1 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	535,769,283.69	0,00
9 1 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
9 1 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00
9 2	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
9 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
9 2 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
9 2 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00
9 2 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
9 2 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>7,765,259,132.69</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI</b>	<b>(7,765,259,132.69)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERA</b>		
8 4	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 4 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
8 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
8 4 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 3 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
9 3 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
9 3 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(7,765,259,132.69)</b>	<b>0,00</b>
8 5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 5 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
7 1 6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 1 7	Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 1 8	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 4	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>PEMBILAYAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(10.757.431.194,00)</b>	<b>(7.691.358.848,00)</b>				

Wagub, Pengusaha  
Pemerintah



Muhammad Ldris, SE, M.Si  
Pangkat Pembina Utama Muda  
P I N R K 106212311990031107



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

AKUN	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
<b>KEGIATAN OPERASI</b>			
8 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 1 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00
8 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00
8 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00
8 1 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00
8 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00
8 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00
8 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00
8 2 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00
8 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 3 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00
8 3 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00
8 3 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 1	<b>BEBAN OPERASI - LO</b>	<b>7,765,259,132.69</b>	<b>0,00</b>
9 1 1	Beban Pegawai - LO	4,084,865,394.00	0,00
9 1 2	Beban Barang dan Jasa	3,143,084,455.00	0,00
9 1 3	Beban Bunga	0,00	0,00
9 1 4	Beban Subsidi	0,00	0,00
9 1 5	Beban Hibah	1,540,000.00	0,00
9 1 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00

AKUN	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 4 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT) - LO</b>	<b>(7,765,259,132.69)</b>	<b>0,00</b>





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 PER DESEMBER 2020 DAN 2019  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
EKUITAS AWAL	5,378,511,763.95	5,317,876,172.10
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,765,259,132.69)	(10,413,352,235.15)
<b>DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR</b>		
(RK-PPKD) EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7,691,358,849.00	10,473,987,827.00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>5,304,611,480.26</b>	<b>5,378,511,763.95</b>



Muhammad Idris, SE / M. Si  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19621231 199003 1 10

PAREPARE

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Secara singkat realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2020

*Rupiah*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	2020	2020	PAGU	
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN - LRA</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>				
Pendapatan Pajak Daerah-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA</b>				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer - LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA</b>				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	4.504.020.194,00	4.084.865.394,00	419.154.800,00	90,69
Belanja Barang dan Jasa	3.450.371.000,00	3.235.751.455,00	214.619.545,00	93,78
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>7.955.931.194,00</b>	<b>7.322.156.849,00</b>	<b>633.774.345,00</b>	<b>92,03</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.000.000,00	234.000.000,00	1.000.000,00	99,57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.500.000,00	135.202.000,00	21.298.000,00	86,39
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Operasional BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>391.500.000,00</b>	<b>369.202.000,00</b>	<b>22.298.000,00</b>	<b>94,30</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.347.431.194,00</b>	<b>7.691.358.849,00</b>	<b>656.072.345,00</b>	<b>92,14</b>
<b>Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>8.347.431.194,00</b>	<b>7.691.358.849,00</b>	<b>656.072.345,00</b>	<b>92,14</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>-8.347.431.194,00</b>	<b>-7.691.358.849,00</b>	<b>-656.072.345,00</b>	<b>92,14</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Daerah Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Kepada Pihak Ke Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SilPA</b>	<b>-8.347.431.194,00</b>	<b>(7.691.368.849,00)</b>	<b>(666.072.345,00)</b>	

### 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

a. Hambatan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan ada yang tidak terlaksana karena terkendala Pandemi COVID19
2. Kegiatan yang sudah dianggarkan tidak terlaksana sepenuhnya dikarenakan adanya pembatasan akibat COVID19

Lampiran 06 Dokumentasi





### BIODATA PENULIS



Ricky Anwar, Lahir di Polewali pada tanggal 16 Juni 1999. Anak dari pasangan Anwar Ade dan Hartika Cedda. Anak kedua dari tiga bersaudara, bertempat tinggal di JL. Lasinrang, Temmassarangge, Paleteang, Kabupaten Pinrang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Pinrang. Kemudian, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Pinrang. Selanjutnya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Pinrang, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis

